

## **BAB I**

### **Pendahuluan**

#### **1.1 Latar belakang**

Pengembangan ekonomi masyarakat pada prinsipnya adalah tugas anak bangsa karena tujuan utamanya adalah kesejahteraan bangsa. Namun demikian, sesuai dengan prinsip hidup bernegara dan berpemerintah, maka pemegang amanah yang bertugas untuk mengembangkan ekonomi masyarakat adalah penyelenggara negara, utamanya pemerintah beserta segenap jajarannya, baik dipusat maupun di daerah. Oleh karena itu maka penyelenggara negara, khususnya pemerintah dan segenap jajarannya harus berperan aktif dalam mendorong investasi, untuk mengembangkan ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut (Henry, 2009) pemerintah sebagai penyelenggara negara, perlu dan harus berperan aktif untuk mengembangkan investasi nasional, karena berkaitan erat dengan pencapaian tujuan bernegara mensejahterakan seluruh rakyatnya. Keterlibatan suatu pemerintah dalam pengembangan investasi di negara, pada hakekatnya menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara negara. Oleh karena itu maka peran ini tidak boleh hilang, dibatasi, tidak bisa dihalangi, atau dihilangkan, oleh alasan globalisasi atau perdagangan bebas, ataupun alasan lainnya. Tujuan negara dimanapun didunia adalah mensejahterakan rakyat atau masyarakatnya secara luas. Untuk melaksanakan tujuan tersebut, maka negara harus berdaulat (kedalam, maupun keluar) dan dapat melindungi kepentingan nasionalnya.

Kebijakan pemerintah dibidang investasi ini merupakan wujud dari peran pemerintah sebagai unsur utama penyelenggara negara. Setiap kebijakan negara yang dibuat pemerintah tidak terlepas dari kepentingan nasional negara tersebut yang terdiri dari: *Kepentingan ekonomi* adalah kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan secara fisik, yaitu terpenuhinya hajat hidup segenap warga bangsa yang meliputi: kecukupan pangan, sandang, papan, serta kebutuhan akan barang dan jasa lainnya sesuai dengan

kemajuan peradapan yang dialaminya. *Kepentingan pertahanan dan keamanan* adalah kepentingan yang berkaitan dengan terciptanya kekuatan untuk mempertahankan eksistensi dan kedaulatan negara dan berbagai gangguan baik dari luar maupun dari dalam. Terkait dengan hal ini adalah kepentingan terwujudnya keamanan dalam hidup bernegara dan berbangsa. Kepentingan pertahanan dan keamanan ini tidak dapat berdiri sendiri dan sangat erat kaitannya dengan terpenuhi dan terjaganya kepentingan ekonomi negara tersebut dengan baik. *Kepentingan politik* adalah kepentingan yang berkaitan dengan kekuasaan atau pengaruh suatu negara berbagai negara lain didunia. Dengan terwujudnya kepentingan politik ini, maka suatu negara menjadi lebih kuat kedaulatannya, sehingga mempengaruhi negara lain untuk membantu paling tidak, tidak menghalangi perjuangan negara tersebut dalam mencapai tujuan atau kepentingan nasionalnya, seperti halnya kepentingan pertahanan dan keamanan, kepentingan politik ini juga tidak dapat berdiri sendiri, memerlukan dukungan ekonomi dan pertahanan keamanan

Investasi sering juga di sebut penanaman modal atau pembentukan modal. Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal atau perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Jadi sebuah pengeluaran dapat dikatakan sebagai investasi jika ditujukan untuk meningkatkan kemampuan produksi. Investasi merupakan hal yang penting dalam perekonomian.

Dalam teori pertumbuhan investasi didefinisikan sebagai perubahan tingkat modal (stock) yang terjadi dalam suatu perekonomian dimana sebagian dari pendapatan digunakan untuk tabungan. Pergerakan arus tabungan tersebut kemudian diarahkan untuk menciptakan dana investasi yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan ekonomi investasi mempunyai dua peran penting. Pertama, peran dalam jangka pendek berupa pengaruhnya terhadap permintaan agregat yang akan mendorong meningkatnya output dan kesempatan kerja. Kedua, efeknya terhadap pembentukan capital. Investasi akan menambah berbagai peralatan mesin bangunan dan

sebagai nya. Dalam jangka panjang tindakan ini akan meningkatkan potensi output dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Saat ini banyak negara-negara yang melakukan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan investasi baik domestic ataupun modal asing. Hal ini dilakukan oleh pemerintah sebab kegiatan investasi akan mendorong pula kegiatan ekonomi di suatu negara, penyerapan tenaga kerja, peningkatan output yang dihasilkan, penghematan devisa atau bahkan penambahan devisa. Investasi merupakan langkah awal kegiatan produksi, dengan posisi semacam itu investasi pada hakekatnya merupakan langkah awal dari kegiatan ekonomi, untuk mencerminkan ramai tidaknya pembangunan. Dalam upaya menumbuhkan perekonomian setiap negara senantiasa berusaha menciptakan iklim yang dapat mengairahkan iklim investasi tak henti-hentinya dilakukan pemerintah terutama sejak adanya krisis ekonomi

Keadaan penting dalam setiap perkembangan suatu daerah ialah adanya keluwesan peradapan yaitu mengenai struktur masyarakat dan perekonomian. Guna membuka kesempatan untuk adanya perubahan. Keluwesan peradapan ini menghendaki pula terbukanya pikiran yang mendasar untuk kearah yang lebih baik. Dorongan yang kuat untuk perkembangan ekonomi yaitu untuk menjadi makmur. Perkembangan ekonomi meliputi proses pembentukan kapital yang terus menerus untuk menambah alat-alat produksi. Keadaan masyarakat harus memungkinkan adanya akumulasi kapital, yaitu dengan mengadakan investasi yang diambil dari modal asing.

Investasi merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka proses peningkatan taraf hidup masyarakat. Hal ini dapat dimengerti karena investasi pada dasarnya dimaksudkan untuk menambah kapasitas produksi daerah. Dengan bertambahnya kapasitas produksi suatu daerah, maka bertambah pula kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa. Dimana selanjutnya taraf hidup dan kemakmuran masyarakat akan meningkat karena tersedianya alat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Investasi disepakati menjadi kata kunci dalam setiap pembicaraan konsep ekonomi di negara dan suatu daerah. Wacana pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja baru, serta penanggulangan kemiskinan pada akhirnya menempatkan investasi pada posisi ujung tombak sehingga tidak mengherankan apabila pemerintah Indonesia mencangkan gerakan “Tahun Investasi” dengan tujuan meningkatkan jumlah investasi yang ditanamkan di INDONESIA.

Dalam rangka meningkatkan daya saing investasi agar dapat menarik masuknya investasi ke suatu daerah atau negara Indonesia sebanyak mungkin, kelemahan koordinasi antara instansi terkait tersebut perlu diperbaiki dengan cara meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi kelembagaan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Disamping itu perlu dilakukan penataan secara menyeluruh (reformasi) terhadap aparatur negara (civil service reform) serta reformasi pelayanan publik (publik service reform).

Corak teknokratik dari kebijakan desentralisasi/otonomi daerah yang kita selenggarakan saat ini diarahkan sebagai strategi kebijakan Negara untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing perekonomian daerah. Peningkatan kinerja ekonomi tersebut memiliki tujuan akhir (ultimate goal) berupa perbaikan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat. Upaya mencapai tujuan tersebut tentu memerlukan suatu langkah intervensi tepat agar menghasilkan daya dorong signifikan guna meraih pertumbuhan ekonomi tinggi dan memperkecil disparitas pendapatan.

Pada dasarnya, pembangunan daerah merupakan bagian yang terintegrasi dengan pembangunan nasional. Pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai target nasional yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi, dan masalah pembangunan di daerah. Maka dari itu, upaya terwujudnya pembangunan nasional merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sehingga pembangunan nasional merupakan satu kesatuan yang saling bersinergi antar kinerja pembangunan daerah.

Dengan kerangka di atas, Pemerintah Republik Indonesia telah melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah sejak tahun 2001. Kebijakan tersebut berdasarkan fakta bahwa wilayah seluas Indonesia dengan setiap daerah yang ada di

dalamnya memiliki kondisi dan potensi ekonomi tertentu yang sangat bervariasi. Dengan kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, daerah-daerah tersebut diharapkan mampu untuk mengembangkan potensi ekonominya dengan lebih efektif dan efisien.

Tata kelola ekonomi daerah yang baik perlu adanya peran pemerintah dan masyarakat, pemda dan masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam peningkatan komponen-komponen kunci pembentukan daya saing wilayah. Disini sektor swasta (pelaku usaha) memainkan peran besar dalam perekonomian suatu daerah guna menghasilkan nilai tambah output, kesempatan kerja, penerimaan daerah, dan aneka multiplier effects lainnya. Pertumbuhan sektor swasta ini mendorong kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja di sektor formal yang pada gilirannya menyumbang kepada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Mengalir dari uraian tersebut, pertanyaan pengantar studi ini adalah apakah elemen-elemen tata kelola ekonomi, baik pada aras kebijakan (regulasi dan pungutan) maupun kinerja layanan dari birokrasi berada dalam kondisi ideal atau justru bermasalah? Apakah pemda sudah membangun struktur kesempatan berupa lingkungan berusaha yang kondusif bagi kegiatan investasi produktif atau justru menciptakan banyak inefisiensi dan salah urus dalam tata kelola perekonomiannya? Sebagaimana diuraikan lebih lanjut di bawah ini, jawaban sementara berupa gambaran situasi (masalah) dari elemen-elemen tata kelola tersebut menjadi latar dari dilakukannya studi ini.

Secara umum, merujuk laporan *Doing Business 2017*, masih terlihat lemahnya kapasitas pemerintah dalam mendesain strategi bagi kemudahan berusaha dan peningkatan daya saing. Indonesia memang mencatatkan diri sebagai top reformer yang bisa melakukan perbaikan peringkat cukup signifikan, namun posisi ke-91 dari 193 negara yang disurvei jelas menunjukkan masih panjangnya jalan reformasi tata kelola ekonomi di negeri ini. Secara komparatif Indonesia juga masih tertinggal jauh dari negaranegara tetangga seperti Thailand (ke-46), Malaysia (ke-23), apalagi Singapura yang sering menempati papan atas.

Peta masalah serupa juga ditunjukkan dalam studi-studi KPPOD, baik studi kolosal berupa survei pemeringkatan TKED maupun studi kasus/tematis lainnya<sup>1</sup>). Selain capaian awal yang patut diapresiasi dalam pembangunan infrastruktur dan program pengembangan usaha, masih tercatat fakta-fakta keras berupa lemahnya jaminan perlindungan usaha dan aksesibilitas lahan di sebagian daerah, tak pastinya biaya transaksi saat memulai maupun menjalankan usaha, dasar perhitungan dan mekanisme penetapan upah buruh yang rentan diintervensi kepentingan politik, dan seterusnya. Semua masalah ini tentu menghambat kapasitas institusi (kepemerintahan) dan faktor lokasional yang melekat di suatu daerah dalam mendukung terbentuknya daya saing mikro (perusahaan), pertumbuhan swasta dan produktivitas usaha, serta porsi kontribusi investasi bagi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- Bagaimana pengaruh indeks kinerja tata kelola ekonomi daerah sub-Perzinan Usaha, Keamanan dan Resolusi Konflik, serta Infrastruktur Daerah berpengaruh terhadap jumlah Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN)

## **1.3 Tujuan penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan yang hendak di capai adalah:

- Untuk mengetahui tata kelola ekonomi daerah sub-Perzinan Usaha, Keamanan dan Resolusi Konflik, serta Infrastruktur Daerah berpengaruh terhadap jumlah Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam 32 ibu kota propinsi

#### **1.4 Manfaat penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk memperkaya bacaan di perpustakaan Universitas Trunojoyo Madura
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan investasi di Kabupaten Bangkalan
3. Hasil penelitian ini di harapkan dapat di jadikan sebagai masukan dalam usaha meningkatkan investasi di Kabupaten Bangkalan